

# **BAHAN TAYANG**

1

## **MATERI DIKLAT AKUNTABILITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

<b>NAMA</b>	<b>DR. ASEP IWA HIDAYAT, S.Sos. M.Pd.</b>
<b>TMP/TGL LHR</b>	<b>SUMEDANG, 15 JANUARI 1973</b>
<b>JABATAN</b>	<b>WIDYAISWARA MADYA KEMENDAGRI</b>
<b>INSTANSI</b>	<b>PUSDIKLAT KEMENDAGRI</b>
<b>PENDIDIKAN UMUM</b>	<b>S1 –STIA LAN BANDUNG- MGT PEREKONOMIAN NEGARA – 1998</b>
	<b>S2 – UPI BANDUNG-ADMINISTRASI PENDIDIKAN - 2000</b>
	<b>S3 – UPI BANDUNG- ADMINISTRASI PENDIDIKAN - 2014</b>
<b>ALAMAT KANTOR</b>	<b>JL. TM KALIBATA 8 JAKARTA SELATAN JL. SUKAJADI 185 BANDUNG</b>
<b>ALAMAT RUMAH</b>	<b>JL. BABAKAN BARU 14 BANDUNG</b>
<b>HP DAN EMAIL</b>	<b>081321930337 sepwahid@yahoo.com</b>

# 1

3

# Konsep Akuntabilitas

Kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel

1.1

**Pengertian akuntabilitas**

1.2

**Aspek-aspek akuntabilitas**

1.3

**Pentingnya akuntabilitas**

1.4

**Tingkatan akuntabilitas**

3/7/2018

## 1.1 *Pengertian Akuntabilitas*

4

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (ARIFIYADI, Teguh, : 2008 ).

## 1.1 *Pengertian Akuntabilitas*

5

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya (Penny K. Lukito, 2014)

# Apa Yang Dimaksud dengan Akuntabilitas



Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik (LAN RI)

# Akuntabilitas dan Responsibilitas

- Akuntabilitas adalah konsep yang lebih besar daripada responsibilitas. Akuntabilitas adalah sistem mekanisme pertanggungjawaban, yang di dalamnya terdapat tindakan dan sifat bertanggungjawab (responsibilitas).
- Responsibilitas merupakan bagian dari akuntabilitas, atau sering disebut sebagai akuntabilitas profesional, dimana setiap individu maupun institusi bertanggungjawab atas tugas yang diembannya dengan baik

# Indikator adanya Akuntabilitas

8

Jujur

Integritas

Adil

Tanggungjawab

Mendahulukan  
kepentingan publik

Transparan

Kejelasan  
kewenangan

Konsisten

Netral



# 1.1 Pengertian Akuntabilitas

9

Amanah PNS



Nilai  
Publik

Mampu **mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan**, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi

Memiliki **pemahaman dan kesadaran untuk menghindari** dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis

**Memperlakukan warga secara sama dan adil** dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

**Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten** dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan

## 1.2

# Aspek - Aspek Akuntabilitas

10

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan  
(Accountability is a relationship)

Akuntabilitas berorientasi pada hasil  
(Accountability is results-oriented)

Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan  
(Accountability requires reporting)

Akuntabilitas memerlukan konsekuensi  
(Accountability is meaningless without consequences)

Akuntabilitas memperbaiki kinerja  
(Accountability improves performance)

## 1.3 Pentingnya Akuntabilitas

11

Akuntabilitas adalah **prinsip dasar bagi organisasi** yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan

ya



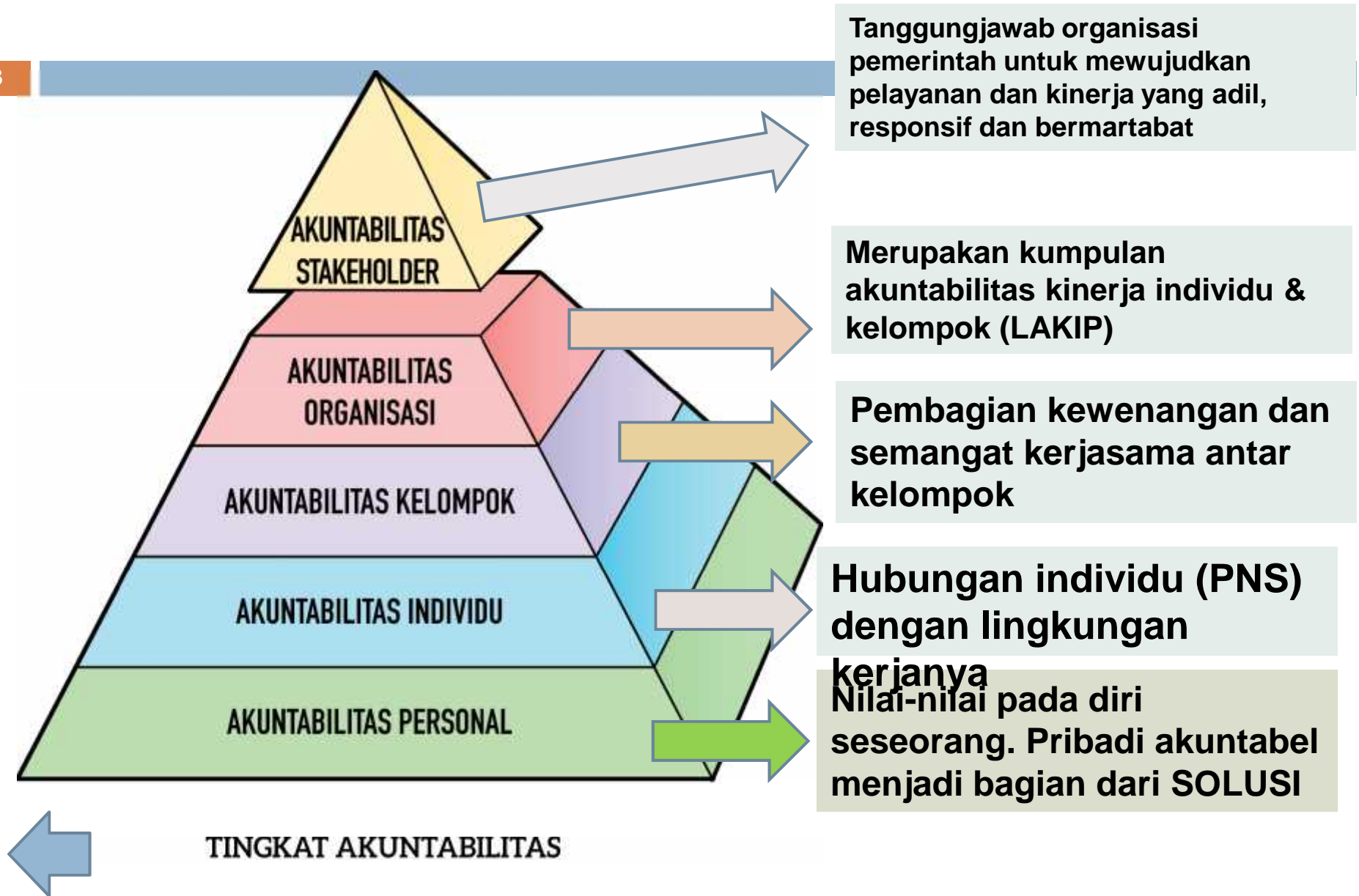
## 1.3 Pentingnya Akuntabilitas

12



# 1.4 Tingkatan Akuntabilitas

13



# 2

## Mekanisme Akuntabilitas

14

Kemampuan memahami mekanisme, logika, dan operasionalisasi dari akuntabilitas guna membangun terciptanya sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel

**Mekanisme akuntabilitas di birokrasi**

2.1

Lingkungan kerja yang akuntabel

2.2

**Framework akuntabilitas**

2.3

## 2.1 Mekanisme Akuntabilitas di Birokrasi

### Alat Akuntabilitas :

15

#### Perencanaan Strategis

- RPJP-D, RPJM-D
- RKP-D, Renstra

#### Kontak Kinerja

- SKP
- Dibuat setiap awal tahun

#### Laporan Kinerja

- LAKIP
- Berisi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran dan analisis capaian, serta akuntabilitas keuangan

## 2.1 Mekanisme Akuntabilitas di Birokrasi

### Dimensi mekanisme akuntabilitas

16

#### Akuntabilitas kejujuran dan hukum

- Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan

#### Akuntabilitas proses

- Terkait sistem dan prosedur
- Diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik

#### Akuntabilitas program

- Memberikan pertimbangan apakah tujuan dapat tercapai
- Apakah ada alternatif program lain

#### Akuntabilitas kebijakan

- Terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil



## 2.2 Lingkungan Kerja yang Akuntabel

17

### Kepemimpinan

- Lead by example

### Transparansi

- Mendorong komunikasi dan kerjasama
- Memberikan perlindungan dari pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
- Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan
- Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan

### Integritas

- Ada kewajiban mematuhi semua peraturan, dan dapat memberikan kepercayaan publik

## 2.2 Lingkungan Kerja yang Akuntabel

18

### Tanggungjawab (Responsibilitas)

- Konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan
- Responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi

### Keadilan

- Merupakan landasan utama dari akuntabilitas

### Kepercayaan

- Lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya

## 2.2 Lingkungan Kerja yang Akuntabel

19

### Keseimbangan

- Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, antara harapan dan kapasitas.

### Kejelasan

- Gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan

### Konsistensi

- Konsistensi menjamin stabilitas

## 2.3 Framework Akuntabilitas

20

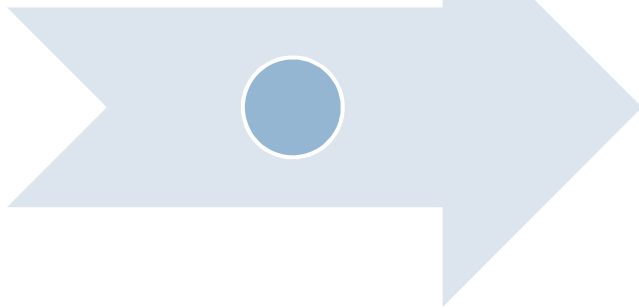


# 3

21

## Akuntabilitas dalam konteks

Pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi



- 3.1 **Transparansi dan akses informasi**
- 3.2 **Praktik kecurangan dan perilaku korup**
- 3.3 **Penggunaan sumber daya milik negara**
- 3.4 **Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah**
- 3.5 **Konflik kepentingan**

# Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Maladministrasi di Ombudsman Indonesia

22

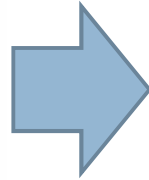
SUBTANSI MALADMINISTRASI	JUMLAH	%
Penundaan Berlarut	1314	25,40%
Penyalahgunaan Wewenang	688	13,30%
Berpihak	129	2,49%
Tidak Memberikan Pelayanan	707	13,67%
Penyimpangan Prosedur	935	18,07%
Permintaan Uang, Barang dan Jasa	478	9,24%
Tidak Kompeten	320	6,19%
Tidak Patut	288	5,57%
Diskriminasi	125	2,42%
Konflik Kepentingan	57	1,10%
Lain-lain	132	2,55%
<b>Total</b>	<b>5170</b>	<b>100%</b>

Sumber: Laporan Tahunan ORI Tahun 2013

3/7/2018

# Akuntabilitas dalam konteks

23



- Merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik
- Memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance berjalan baik dan semakin bermakna bagi kepentingan publik

# Sistem Informasi Kepegawaian

24

The screenshot displays a web browser window with a personnel information page. The browser tabs include 'mybnssearch' and 'Sistem Informasi Kepegawaian'. The address bar shows a URL from 'simg.petro.go.id'. The page title is '[ 197411152004111001 ] Mohammad Hasan Syukur, S.T.'. A profile picture of a man in a white shirt and tie is shown next to his details:

- Nama : Mohammad Hasan Syukur, S.T.
- NIP : 197411152004111001
- Status : Pegawai Negeri Sipil
- Pangkat : Penata Tingkat I III/d
- Jabatan : Widyaiswara Muda
- Unit : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi [Eselon II]  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Below the profile, there are several tabs: 'Data Inisialisasi', 'Alamat', 'Status Pegawai', 'Kepegawaian', 'Jabatan', 'Gaji', 'Uraian', 'Pendidikan Formal', 'Kelas/Revisi', 'Lain-lain'. The 'Kepegawaian' tab is active, showing a table titled 'Daftar Perubahan Pangkat'.

Pangkat	Perhitung Mulai Tanggal	Nomor SK	Status
III/d - Penata Tingkat I	1 April 2014	1239 K/74/LEM/2014	Valid
III/c - Penata	1 Oktober 2010		Valid
III/b - Penata Muda Tingkat I	1 Oktober 2008	1991 K/74/LEM/2008	Valid
III/a - Penata Muda	1 Maret 2006	0763 K/73/LEM/2006	Valid
III/a - Penata Muda	1 November 2004	1677 K/73/LEM/2004	Valid

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the date '29-Jan-15' and time '10:00 PM'.



## 3.1 *Transparansi dan Akses Informasi*

25

**Prinsip keterbukaan informasi :**

**Maximum Access Limited Exemption (MALE)**

**Permintaan tidak perlu disertai alasan**

**Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat**

**Informasi harus utuh dan benar**

**Informasi proaktif**

**Perlindungan pejabat yang beritikad baik**

## 3.2 Praktik kecurangan dan perilaku korup

26

Tiap Tahun, 1.500 PNS Tersangkut Kasus Korupsi



Tiap Tahun,  
1.500 PNS  
Tersangkut  
Kasus  
Korupsi

WAKIL Jaksa Agung Darmono menyatakan keseriusannya mengungkap kasus PNS muda yang memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Kalau data-datanya cukup, ada tindak pidana korupsi. Tentu kasus PNS muda yang memiliki kekayaan tidak wajar, pasti di-tindaklanjuti,” ujar Darmono, seperti dilansir *RakyatMerdeka*, Sabtu (10/12).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menyebutkan, lebih 10 PNS berusia muda yang doyan berkorupsi

dan kekayaannya mencapai miliaran rupiah

Sumber : <http://www.jakartapress.com/detail/read/8027/tiap-tahun-1500-pns-tersangkut-kasus-korupsi> Rabu, 5 November

## **3.2** *Praktik kecurangan dan perilaku korup*

27

**Tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang:**

- 1. Adanya peluang**
- 2. Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang**
- 3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang**

Setiap PNS harus memastikan bahwa:

**Semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku**

**Menggunakannya secara bertanggung-jawab, dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien**

**Memelihara fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.**

**akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan**

**Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus**

- relevant (relevan),**
- reliable (dapat dipercaya),**
- understandable (dapat dimengerti)**

**serta**

- comparable (dapat diperbandingkan)**

## 3.5 Konflik kepentingan

31

Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan

Konflik kepentingan dapat terjadi:

Bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada

Persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada

Potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

# 4

32

## Menjadi PNS yang akuntabel

Kemampuan berperilaku secara akuntabel dalam ranah dan kasus umum yang terkait dengan penegakan akuntabilitas

4.5

Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah

4.6

Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan

4.7

Mengambil keputusan secara akuntabel



## 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

33

PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku



## 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

34

**PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat**



## 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

35



Sumber :  
Photo riau.go.id

kebiasaan kerja  
PNS, perilaku  
dan tempat kerja  
pribadi dan  
profesional  
hubungan  
berkontribusi  
harmonis,  
lingkungan kerja  
yang aman dan  
produktif

## 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

36

**PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan kesejahteraan;**



## 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

37

**PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut**



# 4.1 Apa yang diharapkan dari seorang PNS

38

**PNS melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.**



3/7/2018

# Diakui Dosen Banyak Lakukan Plagiat Naskah Populer

Diakui Dosen Banyak Lakukan Plagiat Naskah Populer

Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). TEMPO/Jacky Rachmansyah

Follow Like 4851

Besar Kecil Normal

**TEMPO.CO, Jakarta** - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Susanto mengatakan, kasus plagiat oleh para dosen banyak terjadi di publikasi ilmiah berupa artikel di jurnal. Bahkan, apabila dibandingkan plagiat artikel lebih banyak daripada plagiat dalam penyusunan naskah akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi atau buat publikasi populer. "Lebih banyak plagiat pada artikel jurnal," kata Djoko saat berkunjung ke kantor *Tempo* di Jakarta, Selasa 25 Februari 2014.

Menurut Djoko, plagiat itu diketahui ketika tim redaksi jurnal-jurnal dalam negeri memeriksa artikel dosen yang bersangkutan. Indikasi adanya plagiasi, kata Djoko, biasanya isi artikel ada yang sama dengan gagasan dalam buku orang lain tapi si penulis tak mencantumkan sumber referensi atau sumber modifikasinya. "Kalau sudah begitu langsung tak bisa diterbitkan artikel mereka," kata Djoko. (Baca: [8 Kasus Plagiat](#) boh di Indonesia)

## Berita Terkait

[Anggito Serahkan Surat Resmi Mundur dari UGM](#)

[Kasus Plagiarisme, Anggito Serahkan Berkas Tulisan](#)

[Anggito Abimanyu Curhat kepada Rektor UGM](#)

[Rektor UGM: Anggito Peduli Kegiatan Mahasiswa](#)

[8 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia](#)

## Topik

[#Plagiarisme | Penjiplakan](#)

[#Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi](#)

**Stop Plagiarism**



<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/Diakui-Dosen-Banyak-Lakukan-Plagiat-Naskah-Populer> Selasa, 25 Februari 2014

- PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi;



REPUBLIK INDONESIA

Kejuruan  
3



**UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

**SOAL PRAKTIK KEJURUAN**

Sarana Pendidikan :	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian :	Teknik Pendingin dan Tata Udara
Kode :	1218
Alokasi Waktu Uji :	18 jam
Bentuk Soal :	Paragraf dan Perhitungan

---

**I. PETUNJUK**

1. Periksa kembali dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 6 halaman.
2. Baca dan pahami soal sebelum melaksanakan praktik uji kompetensi.
3. Siapkan peralatan sesuai dengan ketentuan.
4. Saat bekerja perhatikan keselamatan kerja.
5. Pekerjaan seefektif mungkin agar tepat waktu.
6. Pekerjaan sendiri dari langkah:
  - a. Persiapkan alat dan bahan
  - b. Mengurutkan komposisi bahan dari semua komponen
  - c. Pemasangan tali ketiak siap pakai
  - d. Memasok komponen-komponen dengan tepat dan benar
  - e. Menyambung kabel kontrol dan kabel daya dengan benar
  - f. Melakukan uji coba dengan menggunakan alat ukur
  - g. Melakukan uji coba tanpa beban
  - h. Melakukan uji coba parallel pada beban acung dengan yaitu pada unit control storage
7. Bila pekerjaan telah selesai, laporkan kepada Pengawas.

**II. KESELAMATAN KERJA**

1. Gerakan pakaiin kerja.
2. Gerakan atau sesuai dengan fungsinya.
3. Tempatkan atau direndam sesuai dengan ketentuan.
4. Gerakan atau keselamatan kerja.
5. Lakukan pengujian dengan menggunakan alat ukur terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian menggunakan sumber listrik.
6. Perhatikan barulah dengan tegangan 3 fase.

1218-P3-12/13
Praktik Uji Kompetensi Kejuruan
SPK-025



**PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain.**

Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang;

PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat.



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1245 K/70/MEM/2002  
NOMOR : 18 Tahun 2002

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI  
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- ❑ PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya;
- ❑ PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya;
- ❑ PNS akan melaporkan setiap curang atau korup;



## 4.3

# Menghindari perilaku yang curang dan koruptif

44

- ❑ PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka;
- ❑ PNS akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik



- PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi;
- PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantor dan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian barang dan jasa;
- PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan;
- PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan;

- **PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab;**
- **PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan;**
- **PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.**

## 4.5

# Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah

47

PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;

PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;

PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan;

**PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;**

PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

3/7/2018

4.

## Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah

48



PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

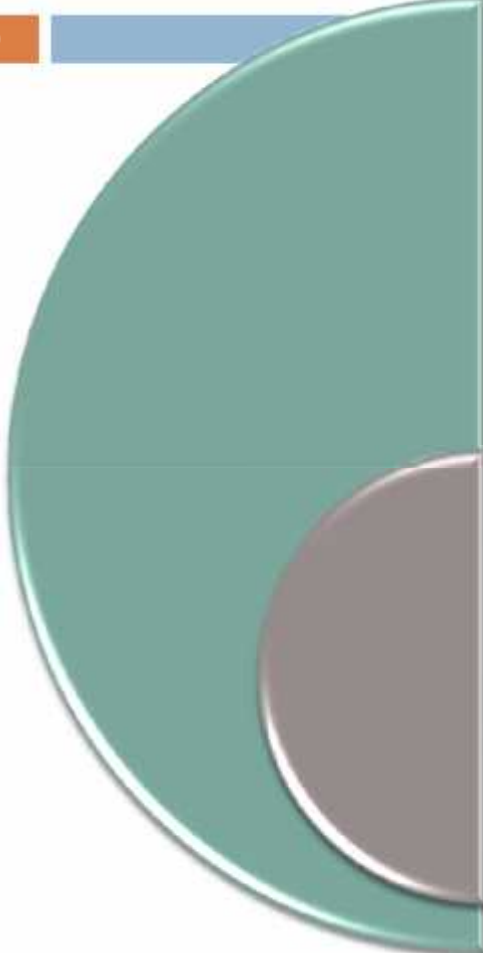


PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.



## 4.6 Menghindari konflik kepentingan

49

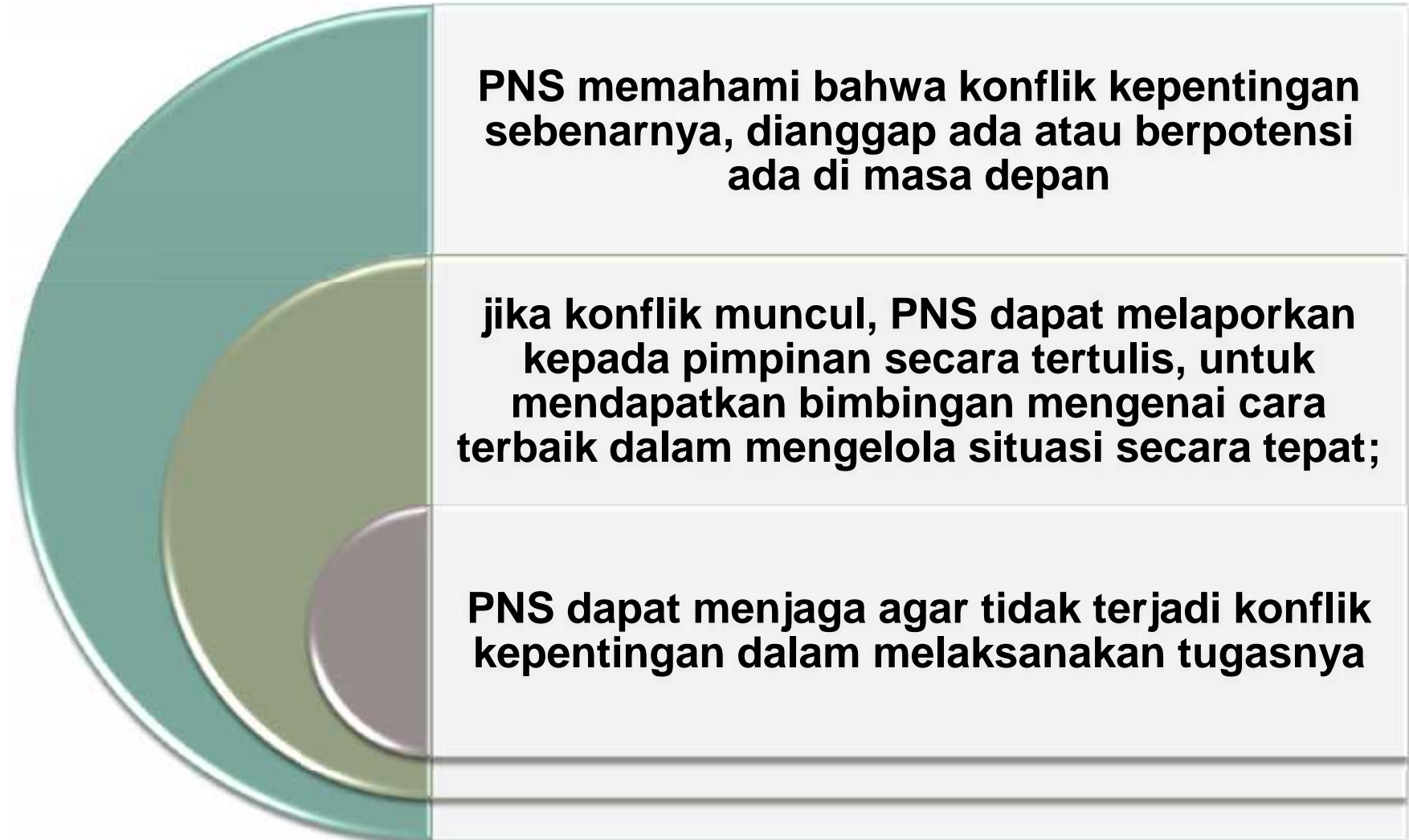


PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak;

ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum;

## 4.6 Menghindari konflik kepentingan

50



## 4.7 Mengambil keputusan secara akuntabel

51

- Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias;
- bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip *due process*;
- akuntabel dan transparan;
- melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien;
- berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya;
- mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan

# Silahkan berdiskusi dalam kelompok

52

1. **Bentuk kelompok**
2. **Masing-masing anggota kelompok menceritakan pengalaman tentang mendapatkan pelayanan PNS/institusi yang tidak baik**
3. **Pilih salah satu cerita sebagai topik, lalu diskusikan solusi dan pencegahannya.**
4. **Simpulkan Nilai-Nilai Akuntabilitas yang dapat diambil sebagai pelajaran**
5. **Buat materi presentasinya**
6. **Presentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan**

# Hasil Internalisasi

53

- Pikirkan dan renungkan apa yang sudah dipelajari selama masa pembelajaran akuntabilitas
- Buatlah hasil internalisasi terhadap nilai-nilai AKUNTABILITAS dan masukkan dalam format aktualisasi.
- Waktu yang disediakan 30 menit
- Kumpulkan



“Jangan biarkan mereka sengsara karena ketidakpedulian kita akan nasib bangsa”

Wassalamu 'alaikum

55

# SEMOGA BERMANFAAT

